

STATISTIK PEREKONOMIAN KOTA PALOPO 2021



DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK



SAMBUTAN

WALIKOTA PALOPO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebutuhan akan berbagai informasi hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan oleh publik sebagai salah satu bentuk transparansi. Karena dengan adanya informasi hasil pembangunan dapat diketahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai secara riil dan objektif.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu disusun publikasi yang telah lazim dikenal yaitu Statistik Perekonomian Kota Palopo, dimana didalamnya menyajikan angka Produk Domestik Regional Bruto.

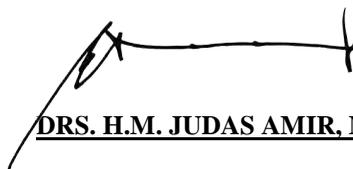
Salah satu informasi yang diperlukan untuk melihat gambaran perkembangan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun adalah angka Produk Domestik Regional Bruto, dimana angka Produk Domestik Regional Bruto tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita semua seberapa besar tingkat pendapatan ekonomi dan tingkat pendapatan perkapita penduduk dapat dicapai. Sehingga dengan tersedianya Publikasi Statistik Perekonomian Kota Palopo ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan data dan informasi baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat dan swasta.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, semoga yang tersaji dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing dan memberi petunjuk pada setiap usaha kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palopo, November 2021

WALIKOTA PALOPO



DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH.



**DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK
KOTA PALOPO**

S A M B U T A N

Publikasi Statistik Perekonomian Kota Palopo merupakan publikasi yang sangat penting mengingat publikasi tersebut memberikan gambaran kondisi, struktur dan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo menerbitkan Publikasi Statistik Perekonomian Kota Palopo sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.

Dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah yang selaras dengan aspirasi masyarakat dibutuhkan informasi data perkembangan ekonomi baik secara global maupun per sektor lapangan usaha serta kontribusi sektor-sektor usaha dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah.

Oleh karena itu publikasi ini menjadi penting dan merupakan salah satu acuan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan pada masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan masukan dari instansi sebagai sumber data baik validitas datanya maupun teknis penyajiannya.

Terima kasih.

Palopo, November 2021

Dinas Persandian dan Statistik
Kota Palopo
K e p a l a,

RENALDI, SE, MM

NIP. 19611231 198305 1 173



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALOPO

S A M B U T A N

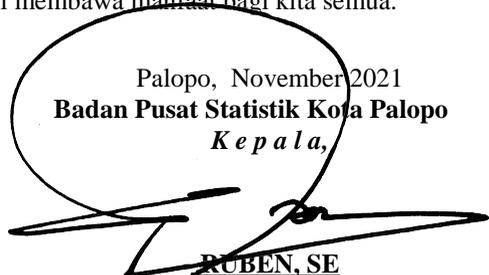
Produk Domestik Regional Bruto merupakan data strategis yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak khususnya pemerintah daerah. PDRB mampu memberi gambaran tentang perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat, besarnya pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, struktur perekonomian suatu wilayah dan juga salah satu indikator komponen penyusunan DAU (Dana Alokasi Umum).

BPS telah diberikan kepercayaan oleh Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo sebagai Tim Ahli dalam penghitungan angka PDRB tersebut. Angka yang tersaji dalam publikasi ini telah melalui proses/tahap rekonsiliasi di tingkat provinsi. Dengan demikian keseimbangan serta kelayakan data baik antara daerah dengan data di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun antar daerah itu sendiri makin konsisten.

Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai Tim Ahli dalam penyusunan publikasi ini.

Semoga publikasi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Palopo, November 2021
Badan Pusat Statistik Kota Palopo
K e p a l a,



RUBEN, SE
NIP. 19631223 199202 1 001

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
Sambutan Walikota Palopo	i
Sambutan Kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	ii
Sambutan Kepala BPS Kota Palopo	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Umum	2
1.2. Konsep dan Definisi	6
1.3. Metode Penghitungan	12
BAB II Tinjauan PDRB Kota Palopo	
2.1. Perkembangan Ekonomi	17
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	20
2.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi	22
2.4. Struktur Ekonomi	24
2.5. PDRB Perkapita	27

BAB III	Pertumbuhan Riil menurut Lapangan Usaha	
3.1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan...	33
3.2.	Pertambangan dan Penggalian	34
3.3.	Industri Pengolahan	34
3.4.	Pengadaan Listrik dan Gas	34
3.5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35
3.6.	Konstruksi.....	36
3.7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36
3.8.	Transportasi dan Pergudangan.....	37
3.9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ...	37
3.10.	Informasi dan Komunikasi.....	39
3.11.	Jasa Keuangan dan Asuransi.....	39
3.12.	Real Estat.....	40
3.13.	Jasa Perusahaan.....	40
3.14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	40
3.15.	Jasa Pendidikan.....	41
3.16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial..	41
3.17.	Jasa Lainnya.....	42

DAFTAR TABEL

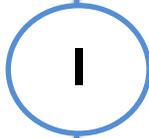
Tabel 2.1	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2020, (Juta Rp)	19
Tabel 2.2	Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, 2018 – 2020 (Persen)	19
Tabel 2.3	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2018 – 2020 (Persen)	20
Tabel 2.4	Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Palopo, 2019 – 2020 (Persen)	23
Tabel 2.5	Struktur Ekonomi Kota Palopo Tahun 2018 – 2020 (Persen)	25
Tabel 2.6	PDRB Perkapita Kota Palopo dan Sulawesi Selatan, 2018 – 2020 (Rupiah)	27
Tabel 3.1	Pertumbuhan Riil menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2020 (Persen)	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Palopo, 2016 – 2020 (Persen)	22
Gambar 2.2	Struktur Ekonomi Kota Palopo, 2020 (Persen)	26
Gambar 2.3	Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 (Persen)	26
Gambar 2.4	PDRB Perkapita Kota Palopo dan Sulawesi Selatan, 2018 – 2020 (Rupiah)	28
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2017–2020	33
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2017 – 2020	38

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2020 (Juta Rp)	44
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 - 2020 (Juta Rp)	45
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2020 (Persen) ..	46
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2020 (Persen)...	47
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo, Tahun 2018 - 2020 (Persen)	48
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Palopo, Tahun 2018 – 2010 (Persen).....	49



Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 U m u m

Pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka memang dapat dicapai, namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di perdesaan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986 : bab 1). Ini pula yang agaknya memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986 : 12; Meier, 1989 : 7). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional maupun domestik, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Hal ini beranjak dari pertanyaan, benarkah semua indikator ekonomi yang ada memberikan gambaran kemakmuran? Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GDP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan

distribusi pendapatan yang semakin timpang dan penurunan tingkat pengangguran yang ada.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (*Blekely, 1989*).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 200; Todaro, 200 : 16 – 18), yaitu :

1. Ketahanan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup
2. Harga diri (*self esteem*) : pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas, pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu

3. *Freedom from servitude* : kebebasan bagi setiap individu suatu negara/wilayah/daerah untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Begitu pentingnya pembangunan ekonomi ini, maka perencanaan pembangunan ekonomi yang matang dan tepat menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, menentukan strategi dan membuat kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Di dalam perencanaan ekonomi suatu daerah pada dasarnya ada 2 (dua) permasalahan pokok yaitu : (i) bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap, (ii) bagaimana agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima masyarakat secara merata. Sehingga sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi/teguh dan pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan/golongan masyarakat sehingga tercipta suatu stabilitas ekonomi yang mantap.

Oleh karena itu, di dalam membuat perencanaan pembangunan ekonomi tersebut, dibutuhkan berbagai macam data statistik yang lengkap (*complete*), tepat (*accurate*), mutakhir (*up to date*) dan terpercaya (*reliable*) sebagai bahan analisa dalam menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan serta sebagai bahan/dasar dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil.

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan tersebut adalah informasi mengenai gambaran perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat guna mengetahui pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai serta potensi-potensi komoditi ekonomi yang potensial dan perlu dikembangkan. Salah satu langkah yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari hasil pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah/wilayah adalah dengan menghitung nilai tambah dari pada produk barang dan jasa yang telah dihasilkan pada suatu wilayah/daerah yang lazim disebut "*Produk Domestik Regional Bruto*".

Namun demikian tidaklah cukup mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari capaian angka PDRB yang tercipta dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap tahunnya. Akan tetapi perlu dilakukan analisis lebih lanjut, apakah pencapaian tersebut telah diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata, ketimpangan pendapatan semakin tereduksi, tingkat pengangguran berkurang dan kemiskinan semakin menurun.

Dengan tersedianya informasi data PDRB yang dirinci menurut tujuh belas kategori lapangan usaha, maka beberapa keperluan yang terkait dengan nilai-nilai yang dihasilkan dari perhitungan tersebut dapat dipenuhi antara lain :

- Nilai PDRB berdasarkan atas harga berlaku dan konstan
- Nilai Distribusi per kategori/sub kategori (*sharing*) terhadap PDRB

- Laju pertumbuhan ekonomi per kategori/sub kategori
- Nilai PDRB perkapita

Adapun kegunaan dari informasi data PDRB antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah/daerah.
2. Untuk mengetahui stuktur/pergeseran struktur perekonomian suatu daerah.
3. Mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk.
4. Sebagai salah satu indikator komponen penyusunan DAU (Dana Alokasi Umum).

1.2 Konsep dan Definisi

Berikut ini dijelaskan beberapa konsep dan definisi yang dipakai dalam penghitungan PDRB Kota Palopo.

1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai tambah bruto adalah tambahan nilai yang ditimbulkan oleh aktifitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan baku dan penolong sehingga lebih dekat kepada pengguna atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor produksi. Apabila seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka tertentu dijumlahkan maka diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

PDRB bisa disajikan dari tiga pendekatan.

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

1.2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang “tetap” pada tahun dasar. Dalam publikasi ini harga pasar yang tetap itu adalah harga-harga pada keadaan tahun 2010. Biasanya disebut PDRB harga konstan dengan tahun dasar 2010.

1.2.4 PDRN (Produk Domestik Regional Neto) Atas Dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar adalah PDRB dikurangi dengan nilai penyusutan barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

1.2.5 PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi

PDRN atas dasar biaya faktor produksi adalah nilai PDRN atas dasar harga pasar dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung netto pada tahun yang bersangkutan

1.2.6 Pendapatan Regional (*Regional Income*)

Pendapatan regional adalah nilai PDRN atas dasar biaya faktor ditambah dengan pendapatan neto (Pendapatan yang masuk dikurangi dengan pendapatan yang keluar).

Karena arus pendapatan diatas sulit dihitung, maka pendapatan regional dianggap sama PDRN atas biaya faktor.

1.2.7 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah PDRN atas dasar biaya faktor produksi dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk tahun yang sama.

1.2.8 Penyusutan Barang Modal Tetap

Penyusutan barang modal tetap adalah susutnya nilai suatu barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

1.2.9 Pajak Tidak Langsung Neto

Pajak tidak langsung neto adalah pajak tak langsung dikurangi subsidi yang diberikan kepada produsen pada tahun yang sama.

1.2.10 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Angka ini didapat dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Akan tetapi angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk (pendapatan per kapita) secara nyata dan merata, karena angka tersebut hanya merupakan angka rata-rata. Namun demikian angka tersebut bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Formulasi dari PDRB perkapita di atas adalah sebagai berikut :

$$\text{PDRB Perkapita} = (\text{PDRB} / \text{POP})$$

dimana,

PDRB perkapita : Rata-rata PDRB perkapita

POP : Penduduk Pertengahan Tahun

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

1.2.11 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Provinsi maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

1.3 Metode Penghitungan

1.3.1 Metode Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku

Ada 2 (dua) metode penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku yang dapat dilakukan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah, sehingga dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi suatu daerah dan dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara mengalokir pendapatan regional propinsi menjadi pendapatan regional kabupaten/kota dengan memakai berbagai macam indikator produksi atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator.

1.3.2 Metode Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan

Secara konsep nilai atas dasar konstan mencerminkan kuantum produksi pada tahun berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode statistik, suatu nilai atas dasar harga konstan dapat diperoleh dengan cara :

1.3.2.1 Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar

Revaluasi atas kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar yaitu cara menaksir nilai produksi dengan mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Baik produksi, biaya antara, penyusutan maupun pajak tidak langsung juga dinilai dengan harga pada tahun dasar tersebut.

1.3.2.2 Deflasi/double deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga

Deflasi/double deflasi atas suatu nilai pada tahun berjalan dengan suatu indeks harga yaitu cara menaksir nilai produksi atau nilai tambah suatu harga kosan dengan cara membagi indeks harga atau nilai tambah harga berlaku dengan indeks harga yang terkait.

1.3.2.3 Ekstrapolasi atas suatu nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum

Ekstrapolasi atas suatu nilai tahun dasar dengan suatu indeks kuantum yaitu cara menaksir produksi atau nilai tambah bruto harga konstan dengan cara mengalikan nilai produksi atau nilai tambah bruto harga berlaku pada tahun dasar dengan indeks produksi.

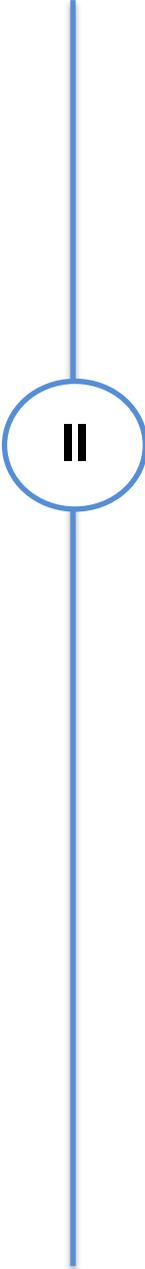
1.3.3 Penyajian Data

a. Klasifikasi Kategori Lapangan Usaha

Dalam PDRB, penyajian unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. B. Pertambangan dan Penggalian
3. C. Industri Pengolahan
4. D. Pengadaan Listrik dan Gas
5. E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. F. Konstruksi
7. G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. H. Transportasi dan Pergudangan
9. I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. J. Informasi dan Komunikasi
11. K. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. L. Real Estat
13. M, N. Jasa Perusahaan
14. O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15. P. Jasa Pendidikan
16. Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. R,S,T,U. Jasa Lainnya



II

**Tinjauan PDRB
Kota Palopo**

BAB II

TINJAUAN PDRB KOTA PALOPO

2.1 Perkembangan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. Sehingga PDRB bisa digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah/region. Besar kecilnya nilai PDRB suatu wilayah sangat ditentukan oleh aktifitas perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan perbandingan PDRB antar tahun, dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selain itu PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian serta perubahan harga di tingkat produsen (*inflasi/deflasi*).

Perkembangan perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut. Untuk itu sebagai usaha meningkatkan laju perputaran roda perekonomiannya, pemerintah Kota Palopo terus menerus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dengan membuat dan menetapkan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Pada awal tahun 2020, dunia (termasuk Indonesia) dilanda oleh virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak nafas akut yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. *World Health Organization* (WHO) bahkan menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global pada bulan Maret 2020. Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 12/2020 tanggal 13 April 2020 menetapkan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Peristiwa ini berdampak terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Tidak terkecuali di Kota Palopo, imbas pandemi covid-19 juga membuat kelesuan terhadap perekonomian. Berbagai pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palopo turut andil terhadap perekonomian pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar 8,02 triliun rupiah atau naik sebesar 82,81 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara bila dilihat PDRB atas dasar harga konstan (adhk) pada tahun 2020 sebesar 5,47 triliun rupiah atau hanya meningkat sebesar 0,45 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 2.1 PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2020, (Juta Rp)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)
2018	7.285.142,35	5.102.987,20
2019*	7.942.481,04	5.447.357,00
2020**	8.025.289,92	5.472.077,18

Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Nilai PDRB Kota Palopo tahun 2020 sebesar 8,02 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,59 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi tersebut bertambah sebesar 0,02 persen bila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 Kontribusi PDRB Kota Palopo terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, 2018–2020 (Persen)

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Juta Rp)	PDRB Kota Palopo (Juta Rp)	% Kota Palopo terhadap Sulawesi Selatan
2018	461.774.735,78	7.285.142,35	1,58
2019*	504.321.741,00	7.942.481,04	1,57
2020**	504.478.540,39	8.025.289,92	1,59

Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), maka pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional menggunakan harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Tabel 2.3 Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2018 – 2020 (Persen)

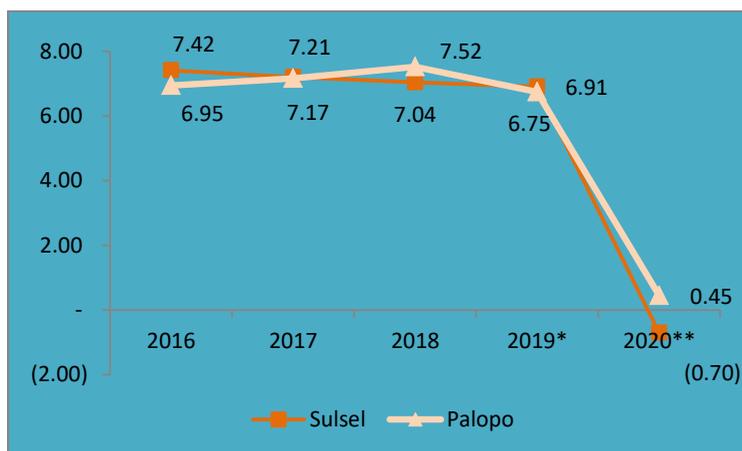
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	7.285.142,35	11,82	5.102.987,20	7,52
2019*	7.942.481,04	9,02	5.447.357,00	6,75
2020**	8.025.289,92	1,04	5.472.077,18	0,45

Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Selama periode 2018-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sebesar 7,52 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 perekonomian tumbuh sebesar 6,75 persen lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Palopo tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Kota Palopo hanya tumbuh sebesar 0,45 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Kota Palopo saja. Bahkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terkontraksi hingga 0,70 persen. Gambaran selengkapnya terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Palopo, 2016 - 2020 (Persen)



Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020, hampir semua lapangan usaha terdampak Covid-19. Beberapa lapangan usaha harus mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebagai dampak dari pandemi.

Lapangan usaha yang terdampak paling besar adalah transportasi dan pergudangan. Pembatasan mobilitas penduduk selama pandemi membuat lapangan usaha ini tumbuh negatif hingga 14,17 persen. Tidak hanya itu, penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 7,01 persen. Kedua lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2020 masing-masing sebesar minus 0,81 persen untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan dan minus 0,08 persen untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Lapangan usaha lain yang memberikan sumber pertumbuhan negatif terhadap perekonomian yaitu lapangan usaha industri pengolahan. Lapangan usaha ini juga mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2020 sebesar 5,99 persen dan berkontribusi negatif 0,15 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

Meskipun demikian, di masa pandemi ada beberapa lapangan usaha yang justru mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 12,34 persen. Lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo selama tahun 2020. Perubahan pola kerja dan sekolah selama masa pandemi dari tatap muka menjadi daring menyebabkan lapangan

usaha ini tetap tumbuh positif meskipun terjadi pandemi Covid-19. Informasi selengkapnya mengenai laju pertumbuhan dan sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Palopo, 2019 – 2020 (Persen)

Lapangan Usaha	2019*	2020**	Sumber Pertumbuhan 2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	1,47	0,23
2. Pertambangan dan Penggalian	1,73	(0,86)	(0,00)
3. Industri Pengolahan	7,75	(5,99)	(0,15)
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3,89	3,64	0,00
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,56	(0,05)	(0,00)
6. Konstruksi	6,10	(0,55)	(0,08)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,05	0,35	0,09
8. Transportasi dan Pergudangan	9,15	(14,17)	(0,81)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,93	(7,01)	(0,08)
10. Informasi dan Komunikasi	10,63	12,34	0,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,29	2,46	0,17
12. Real Estat	5,73	4,82	0,22
13. Jasa Perusahaan	9,94	(1,84)	(0,00)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	(0,59)	(0,04)
15. Jasa Pendidikan	5,91	1,40	0,07
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,37	3,27	0,09
17. Jasa Lainnya	9,28	(0,69)	(0,01)
PDRB	6,75	0,45	0,45

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

2.4 Struktur Ekonomi

Salah satu turunan dari penghitungan nilai PDRB adalah distribusi per kategori yang menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat diketahui dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku setiap sektor/lapangan usaha. Dari komposisi PDRB sektoral dapat dilihat gambaran “peranan” dari setiap kategori terhadap pembentukan PDRB wilayah tersebut.

Semakin besar peranan suatu kategori terhadap pembentukan total PDRB, maka semakin besar pula “**pengaruh**” kategori tersebut dalam perkembangan perekonomian wilayah itu. Selain itu, dengan melakukan perbandingan antar tahun bisa dilihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada Tabel 2.5 terlihat bahwa selama tahun 2018-2020 tiga lapangan usaha yang memberikan pengaruh terbesar terhadap perekonomian Kota Palopo yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan lapangan usaha konstruksi. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sekitar 23,66-24,47 persen. Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 16,39-16,91 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 16,40-16,75 persen terhadap perekonomian Kota Palopo.

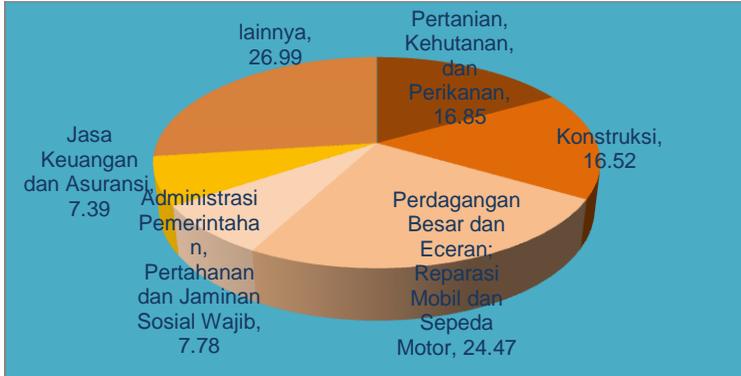
Tabel 2.5 Struktur Ekonomi Kota Palopo Tahun 2018 - 2020 (Persen)

Lapangan Usaha	2018	2019*	2020**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,91	16,39	16,85
2. Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,16
3. Industri Pengolahan	2,70	2,72	2,56
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17
6. Konstruksi	16,40	16,75	16,52
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,66	24,41	24,47
8. Transportasi dan Pergudangan	5,94	5,99	5,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,18	1,09
10. Informasi dan Komunikasi	4,14	4,22	4,67
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,78	7,30	7,39
12. Real Estat	4,92	4,84	5,02
13. Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,96	7,77	7,78
15. Jasa Pendidikan	4,25	4,31	4,35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,32	2,41
17. Jasa Lainnya	1,29	1,31	1,29
P D R B	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Kota Palopo, 2020 (Persen)



Gambaran struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan berbeda dengan Kota Palopo. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi penyumbang terbesar (21,70 persen) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Kemudian disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,47 persen. Berikutnya kategori Konstruksi menyumbang sebesar 14,35 persen.

Gambar 2.3 Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 (Persen)



2.5 PDRB Perkapita

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Dengan berkembangnya perekonomian Kota Palopo tentunya akan berdampak pada kenaikan PDRB perkapita. Namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka itu hanya merupakan angka rata-rata. Walaupun demikian angka tersebut sudah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Tabel 2.6 PDRB Perkapita Kota Palopo dan Sulawesi Selatan, 2018 - 2020 (Rupiah)

Tahun	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
2018	40.321.137	52.642.079
2019*	43.022.095	56.977.524
2020**	42.614.497	56.505.188

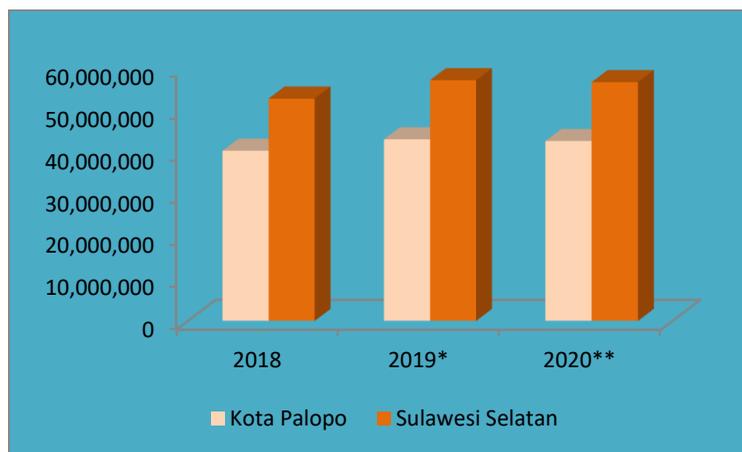
Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Palopo selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.6. Pada

tahun 2020, terlihat bahwa pandemi juga berdampak terhadap penurunan PDRB perkapita baik Kota Palopo maupun Sulawesi Selatan. PDRB perkapita Kota Palopo pada tahun 2020 tercatat sebesar 42,61 juta rupiah, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 43,02 juta rupiah perkapita. Sementara PDRB perkapita Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 meskipun tidak terlalu signifikan. PDRB perkapita Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 56,50 juta rupiah atau turun sebesar 472 ribu rupiah dibandingkan tahun 2019.

Gambar 2.4 PDRB Perkapita Kota Palopo dan Sulawesi Selatan, 2018 - 2020 (Rupiah)



Keterangan: * angka sementara

** angka sangat sementara

Bila dibandingkan dengan besarnya, PDRB perkapita Kota Palopo cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Selatan (amati Gambar 2.4). Hal ini dapat diartikan bahwa secara umum, rata-rata tingkat kesejahteraan

penduduk Sulawesi Selatan cenderung lebih baik bila dibandingkan rata-rata kesejahteraan penduduk Kota Palopo.



**Pertumbuhan
Riil Menurut
Lapangan
Usaha**

BAB III

PERTUMBUHAN RIIL MENURUT LAPANGAN USAHA

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi produksi disajikan ke dalam 17 lapangan usaha. Pengelompokan ini mengacu pada *System National Accounts* (SNA) 2008.

Analisis PDRB yang disajikan menurut lapangan usaha sangat bermanfaat untuk mengetahui sebaran potensi ekonomi yang lebih spesifik dan secara simultan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pada tabel 3.1 disajikan data pertumbuhan riil masing-masing kategori selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 terlihat bahwa pandemi berdampak signifikan terhadap perekonomian Kota Palopo. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, hampir sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2020. Namun, ada juga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif. Informasi selengkapnya mengenai pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha akan dipaparkan di bawah ini.

Tabel 3.1 Pertumbuhan Riil menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2020 (Persen)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	3,42	4,95	1,47
2. Pertambangan dan Penggalian	4,26	2,55	1,73	-0,86
3. Industri Pengolahan	3,57	2,95	7,75	-5,99
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	5,51	3,89	3,64
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,66	8,05	4,56	-0,05
6. Konstruksi	6,40	5,41	6,10	-0,55
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,19	9,15	10,05	0,35
8. Transportasi dan Pergudangan	7,39	10,06	9,15	-14,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,36	7,27	7,93	-7,01
10. Informasi dan Komunikasi	11,56	13,26	10,63	12,34
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	1,67	-0,29	2,46
12. Real Estat	7,48	4,70	5,73	4,82
13. Jasa Perusahaan	7,88	9,23	9,94	-1,84
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,36	16,75	3,27	-0,59
15. Jasa Pendidikan	8,23	10,38	5,91	1,40
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	9,68	6,37	3,27
17. Jasa Lainnya	9,69	12,22	9,28	-0,69
PDRB	7,17	7,52	6,75	0,45

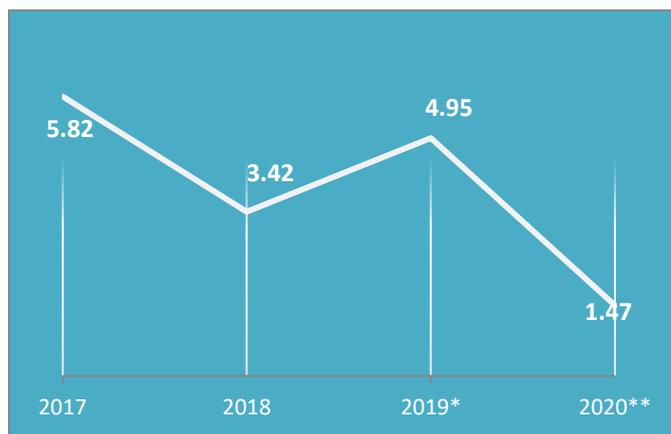
Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

3.1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Palopo. Pada tahun 2020, lapangan usaha ini menyumbang sebesar 16,85 persen terhadap PDRB Kota Palopo atau berkontribusi dengan posisi kedua terbesar. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Persen), 2017 – 2020



Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak terlalu signifikan terdampak pandemi Covid-19. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan, namun lapangan usaha ini mampu tumbuh positif di masa pandemi. Selama tahun

2020, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 1,47 persen. Pertumbuhan pada kategori lapangan usaha ini terutama didukung oleh pertumbuhan sub kategori perikanan, tanaman hortikultura tahunan, dan kehutanan.

3.2 Pertambangan dan Penggalian

Kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 0,16 persen terhadap total perekonomian Kota Palopo pada tahun 2020. Selama masa pandemi, lapangan usaha ini cukup terdampak akibat kurangnya permintaan bahan galian. Pada tahun 2020, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,86 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan menyumbang sebesar 2,56 persen terhadap total perekonomian Kota Palopo pada tahun 2020. Kategori ini juga merupakan salah satu kategori yang terdampak Covid-19. Pada tahun 2020, Kategori Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar -5,99 persen. Dengan besaran laju pertumbuhan tersebut, kategori ini menempati urutan ketiga kategori yang tumbuh negatif paling besar.

3.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,08 persen terhadap perekonomian Kota Palopo pada tahun 2020.

Kategori ini memberikan kontribusi terkecil bagi perekonomian Kota Palopo.

Selama tahun 2020, kategori ini mampu tumbuh positif sebesar 3,64 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah listrik yang tersalurkan dari 164.704.420 kwh pada tahun 2019 menjadi 173.216.633 kwh pada tahun 2020. Meskipun demikian, selama periode 2017-2020 kategori Pengadaan Listrik dan Gas terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.

3.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lainnya. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Palopo selama periode 2018-2020 sebesar 0,17 persen.

Selama tahun 2020, kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar -0,05 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan negatif pada kategori ini terjadi akibat berkurangnya jumlah air yang disalurkan oleh PDAM dari 9.644.345 kubik pada tahun 2019 turun menjadi 9.629.512 kubik pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena kurangnya aktivitas pada hotel, restoran dan rumah kos selama pandemi Covid-19.

3.6 Konstruksi

Lapangan usaha Konstruksi merupakan salah satu dari tiga lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Palopo. Pada tahun 2020 kategori konstruksi menyumbang sebesar 16,52 persen terhadap total perekonomian Kota Palopo.

Selama tahun 2020, pekerjaan konstruksi ikut terimbas pandemi Covid-19. Terjadi penurunan realisasi APBD untuk belanja modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dari 138,13 milyar rupiah pada tahun 2019 menjadi 112,716 milyar rupiah pada tahun 2020. Selain itu, terjadi pula penurunan DAK Fisik APBN dari 115,47 milyar (2019) menjadi 86,53 milyar (2020). Kondisi ini menyebabkan kontraksi laju pertumbuhan sektor konstruksi sebesar -0,55 persen pada tahun 2020.

3.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Palopo. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 24,47 persen terhadap perekonomian Kota Palopo.

Selama tahun 2020 laju pertumbuhan Kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,35 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi selama empat tahun terakhir, laju pertumbuhan sektor ini

mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Selama periode 2017-2019, laju pertumbuhan sektor ini berkisar 9,15-10,19 persen.

Sepanjang tahun 2020 terjadi pembatasan jam operasional tempat perbelanjaan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap omset yang diperoleh pedagang.

3.8 Transportasi dan Pergudangan

Berbagai macam kebijakan telah dilakukan sepanjang tahun 2020 untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 salah satunya dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini tentu saja berdampak pula terhadap mobilitas penduduk yang berimbas terhadap penurunan aktivitas di sektor transportasi dan pergudangan.

Pada tahun 2020, sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh negatif sebesar 14,17 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada masa pandemi beberapa Perusahaan Otobus (PO) banyak yang tidak mengoperasikan bus trayek antar kota dalam provinsi (AKDP) dan bahkan menutup perusahaan.

3.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 1,09 persen terhadap PDRB Kota Palopo. Selama masa pandemi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan negatif terbesar kedua setelah sektor transportasi dan pergudangan.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2017 -2020



Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Selama tahun 2020, laju pertumbuhan sektor ini terkontraksi sebesar -7,01 persen dibandingkan tahun 2019. Terjadi pembatasan jam operasional bagi restoran/tempat makan. Selain itu, selama beberapa waktu, restoran hanya melayani pembelian makanan dibawa pulang. Sementara itu, pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang menyebabkan turunnya kegiatan seperti pertemuan yang biasanya menggunakan hotel digantikan dengan pertemuan virtual. Pandemi covid-19 juga mengurangi aktivitas bepergian seseorang. Kondisi tersebut tercermin melalui penerimaan pajak hotel yang turun sekitar 37,68 persen dan pajak restoran turun sekitar 19,22 persen dibandingkan tahun 2019.

3.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Kota Palopo selama periode 2018-2020 terus mengalami peningkatan berkisar 4,14-4,67 persen.

Pandemi covid-19 menyebabkan perubahan pola kerja dan belajar. Untuk menekan laju penyebaran covid-19 maka dilakukan pembelajaran sekolah melalui virtual dan penyesuaian jam kerja ASN melalui WFH/WFO. Selain itu, pertemuan yang melibatkan banyak orang seperti rapat/pertemuan juga dilakukan melalui *teleconference*. Hal ini menyebabkan tingginya pemakaian pulsa internet yang meningkatkan pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2020, Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami laju pertumbuhan sebesar 12,34 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan kategori ini tertinggi sepanjang tahun 2020 dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Palopo sebesar 0,76 persen.

3.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Selama tahun 2018-2020, kontribusi kategori Jasa Keuangan dan Asuransi secara berturut-turut, yaitu 7,78 persen; 7,30 persen dan 7,39 persen. Selama masa pandemi pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 2,46 persen.

Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan pegadaian sebesar 21,96 persen bila dibandingkan tahun 2019.

3.12 Real Estate

Kategori Real Estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Palopo dengan peranan sebesar kurang dari 6 persen. Selama tahun 2018-2020, kontribusi kategori real estate terhadap perekonomian Kota Palopo berkisar 4,84–5,02 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini sepanjang tahun 2018-2020 masing-masing secara berurutan sebesar 4,70 persen; 5,73 persen; dan 4,82 persen.

3.13 Jasa Perusahaan

Selama 3 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Perusahaan relatif tidak berubah, yaitu sebesar 0,09 persen untuk tahun 2018-2020. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Kota Palopo merupakan kedua terkecil setelah kategori pengadaan listrik dan gas. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2020 sebesar minus 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

3.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Selama tahun 2018-2020 peranannya terhadap perekonomian Kota Palopo tidak mengalami banyak perubahan dengan nilai kontribusi sebesar 7,96 persen; 7,77 persen; dan 7,78 persen.

Selama tahun 2020, laju pertumbuhan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh negatif di tahun 2020 sekitar -0,59 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan belanja pegawai melalui APBD pemerintah Kota Palopo sekitar 1,10 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019.

3.15 Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020 Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 4,35 persen terhadap total perekonomian Kota Palopo. Kontribusi ini terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2020. Hal ini disebabkan oleh peranan Kota Palopo sebagai tempat mengenyam pendidikan yang cukup baik di kawasan Luwu Raya.

Laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Palopo pada tahun 2020 sekitar 1,40 persen. Sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah mahasiswa swasta sekitar 2,81 persen dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,91 persen.

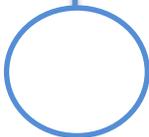
3.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Palopo sebesar 2,41 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 3,27 persen.

Sejak terjadinya pandemi pada awal tahun 2020, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menekan laju penyebaran Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian. Diantaranya *refocusing* belanja lain ke belanja kesehatan yang terkait dengan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, laju pertumbuhan jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020 lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2019.

3.17 Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palopo relatif kecil. Selama periode 2018-2020, peranan kategori ini hanya berkisar 1,29-1,31 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar minus 0,69 persen. Selama tahun 2020, beberapa aktivitas-aktivitas olahraga diruang tertutup dan hiburan seperti tempat karaoke dilakukan pembatasan jam operasional.



Lampiran

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2018-2020 (Juta Rp)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.232.239,2	1.301.467,3	1.352.039,1
B.	Pertambangan dan Penggalian	12.159,4	12.388,7	12.548,0
C.	Industri Pengolahan	197.013,8	216.258,2	205.184,8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.812,5	6.045,8	6.183,3
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.499,3	13.545,1	13.609,0
F.	Konstruksi	1.194.979,1	1.330.130,7	1.325.428,7
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.723.393,3	1.938.859,0	1.963.945,3
H.	Transportasi dan Pergudangan	432.448,2	475.892,1	409.347,7
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85.981,4	93.717,3	87.504,4
J.	Informasi dan Komunikasi	301.913,8	335.274,7	374.815,9
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	566.529,0	579.656,5	593.393,7
L.	Real Estat	358.341,7	384.055,0	403.010,4
M,N	Jasa Perusahaan	6.718,6	7.518,5	7.456,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580.053,8	616.967,7	624.198,0
P	Jasa Pendidikan	309.438,3	342.261,6	349.404,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171.396,3	184.627,3	193.413,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	94.224,9	103.815,5	103.806,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.285.142,4	7.942.481,0	8.025.289,9

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2018-2020 (Juta Rp)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	830.610,0	871.735,0	884.506,1
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.705,0	6.821,0	6.762,1
C.	Industri Pengolahan	129.178,1	139.195,3	130.853,5
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.669,7	5.890,2	6.104,8
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.752,2	15.424,2	15.416,2
F.	Konstruksi	734.325,8	779.139,3	774.835,4
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.291.727,4	1.421.607,5	1.426.599,5
H.	Transportasi dan Pergudangan	286.149,2	312.339,5	268.070,2
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.802,5	64.545,2	60.023,8
J.	Informasi dan Komunikasi	303.015,6	335.222,2	376.602,5
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	383.207,5	382.091,1	391.480,8
L.	Real Estat	233.019,5	246.375,1	258.251,1
M,N	Jasa Perusahaan	4.607,7	5.065,6	4.972,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368.085,5	380.135,5	377.909,0
P	Jasa Pendidikan	247.464,1	262.100,3	265.763,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.062,2	145.791,7	150.561,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	67.605,3	73.878,2	73.365,6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.102.987,2	5.447.357,0	5.472.077,2

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2018-2020 (Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,91	16,39	16,85
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,16
C.	Industri Pengolahan	2,70	2,72	2,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17
F.	Konstruksi	16,40	16,75	16,52
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,66	24,41	24,47
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,94	5,99	5,10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,18	1,09
J.	Informasi dan Komunikasi	4,14	4,22	4,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,78	7,30	7,39
L.	Real Estat	4,92	4,84	5,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,96	7,77	7,78
P	Jasa Pendidikan	4,25	4,31	4,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,32	2,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,29	1,31	1,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00

Keterangan

*) : Angka Sementara

***) : Angka Sangat Sementara

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2018-2020 (Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,42	4,95	1,47
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,55	1,73	-0,86
C.	Industri Pengolahan	2,95	7,75	-5,99
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,51	3,89	3,64
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,05	4,56	-0,05
F.	Konstruksi	5,41	6,10	-0,55
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,15	10,05	0,35
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,06	9,15	-14,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,27	7,93	-7,01
J.	Informasi dan Komunikasi	13,26	10,63	12,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	-0,29	2,46
L.	Real Estat	4,70	5,73	4,82
M,N	Jasa Perusahaan	9,23	9,94	-1,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,75	3,27	-0,59
P	Jasa Pendidikan	10,38	5,91	1,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	6,37	3,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,22	9,28	-0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,52	6,75	0,45

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 5. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO, TAHUN 2018-2020 (Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	148,35	149,30	152,86
B.	Pertambangan dan Penggalian	181,35	181,62	185,56
C.	Industri Pengolahan	152,51	155,36	156,80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	102,52	102,64	101,29
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	84,73	87,82	88,28
F.	Konstruksi	162,73	170,72	171,06
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	133,42	136,38	137,67
H.	Transportasi dan Pergudangan	151,13	152,36	152,70
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143,78	145,20	145,78
J.	Informasi dan Komunikasi	99,64	100,02	99,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,84	151,71	151,58
L.	Real Estat	153,78	155,88	156,05
M,N	Jasa Perusahaan	145,81	148,42	149,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	157,59	162,30	165,17
P	Jasa Pendidikan	125,04	130,58	131,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,05	126,64	128,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	139,38	140,52	141,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		142,76	145,80	146,66

Keterangan

*) : Angka Sementara

**) : Angka Sangat Sementara

TABEL 6. LAJU PERTUMBUHAN INDEKS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PALOPO, TAHUN 2018-2020 (Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	0,64	2,39
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,60	0,15	2,17
C.	Industri Pengolahan	3,59	1,87	0,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,06	0,12	-1,32
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,83	3,65	0,52
F.	Konstruksi	7,92	4,91	0,20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,55	2,22	0,94
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,00	0,82	0,22
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	0,99	0,40
J.	Informasi dan Komunikasi	1,77	0,38	-0,49
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,13	2,62	-0,09
L.	Real Estat	3,75	1,37	0,11
M,N	Jasa Perusahaan	3,95	1,79	1,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	2,99	1,77
P	Jasa Pendidikan	3,70	4,43	0,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,66	1,27	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,84	0,82	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,00	2,13	0,59

Keterangan

*) : Angka Sementara

***) : Angka Sangat Sementara

